

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA EKS
KARESIDENAN YOGYAKARTA TAHUN 2013-2017**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

RENDY PEBRIANTO
B 200150175

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA EKS
KARESIDENAN YOGYAKARTA TAHUN 2013-2017**

PUBLIKASI ILMIAH

OLEH:

RENDY PEBRIANTO

B 200150175

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Eny Kusumawati, S.E., Akt., M.M.

NIDN. 0623037101

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA EKS
KARESIDENAN YOGYAKARTA TAHUN 2013-2017.

Oleh:

RENDY PEBRIANTO

B 200150175

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 14 November 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Eny Kusumawati, S.E., Akt., M.M.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Erma Setiawati, Akt., M.M.
(Anggota I Dewan penguji)
3. Dra. Rina Trisnawati, M.Si., Akt., Ph.D.
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....) 
(.....) 
(.....) 

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Syamsudin, M.M
NIDN. 0017025701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 November 2019

Penulis



RENDY PEBRIANTO

B 200150175

ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA EKS KARESIDENAN YOGYAKARTA TAHUN 2013-2017

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta berdasarkan analisis rasio keuangan daerah. Desain penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta. Metode sampling menggunakan sampling jenuh yaitu dengan meneliti semua Laporan Keuangan berupa APBD dan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta Tahun 2013-2017, terdiri dari empat kabupaten dan satu kota. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu time series, cross sectional, common size dan indeks. Hasil analisis menunjukkan bahwa selama periode 2013-2017 tingkat efektivitas rata-ratanya efektif. Tingkat keserasian lebih besar digunakan untuk belanja operasi daripada untuk belanja modal. Tingkat pertumbuhan PAD, pendapatan, belanja operasi dan belanja modal mengalami rata-rata pertumbuhan yang positif. Tingkat kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah karena berada dalam kategori pola hubungan instruktif dan konsultatif.

Kata Kunci: kinerja keuangan daerah, rasio keuangan, pemerintah daerah

Abstract

This study aims to determine the financial performance of the Ex-residency Regency / Yogyakarta Regional Government based on regional financial ratio analysis. The design of this research is quantitative descriptive research type. The population in this study is the Regency / City of the Ex-Residency of Yogyakarta. The sampling method uses saturated sampling, which is by examining all Financial Statements in the form of APBD and Realization Report of Ex-Yogyakarta Regency / Municipal Budget in 2013-2017, consisting of four districts and one city. The analytical methods used in this study are time series, cross sectional, common size and index. The results of the analysis show that during the period of 2013-2017 the average level of effectiveness was effective. A greater level of harmony is used for operating expenditure than for capital expenditure. The growth rate of PAD, income, operating expenditure and capital expenditure experienced a positive average growth. The level of regional financial independence is still relatively low because it is in the category of instructive and consultative relations.

Keywords: regional financial performance, financial ratios, local government

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 23 tahun 2014). Pemerintah

daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah.

Sebagai organisasi yang tidak berorientasi mencari keuntungan, pemerintah daerah mempunyai tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, infrastruktur, dan penyediaan barang kebutuhan masyarakat. Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi membuka jalan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.

Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya dalam bentuk laporan keuangan yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya (Mahmudi, 2010). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan, selain itu laporan keuangan juga

memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu dengan cara analisis rasio keuangan daerah terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rasio keuangan yang digunakan antara lain: rasio efektivitas, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio kemandirian. Dalam menganalisis kinerja keuangan daerah dapat menggunakan beberapa metode alat perhitungan yaitu cross-section, time-series, commonsize, dan indeks/ trend.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan sebelumnya dan setelah itu dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana belanja daerah yang dimiliki untuk belanja rutin dan belanja pembangunan (Halim, 2012: 221-234).

Rasio pertumbuhan menggambarkan apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan atau selama beberapa periode kinerjanya mengalami pertumbuhan atau tidak (Mahmudi, 2010: 138). Sedangkan rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dengan catatan semakin tinggi rasio semakin rendah tingkat ketergantungannya pada pemerintah pusat (Halim, 2012: 221-234).

2. METODE

Desain penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta tahun 2013-2017 jika dilihat dari analisis rasio keuangannya dan perkembangan kinerja keuangannya jika dilihat dari analisis cross-section, time-series, commonsize dan indeks/ trend.

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang mempunyai ciri tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang selanjutnya untuk diteliti (Sugiyono, 2011: 61). Populasi

dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh yaitu semua digunakan untuk sampel.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dimana data yang dihitung berupa data APBD dan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta. Data tahun 2013 sampai 2014 menggunakan pendekatan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis cash toward accrual, sedangkan untuk data tahun 2015 sampai 2017 menggunakan pendekatan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual. Sumber data penelitian ini merupakan data sekunder berupa data dokumentasi yang diperoleh dari situs www.djpk.kemenkeu.go.id dengan mengunduh data terhadap masing-masing laporan keuangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 1. Perhitungan Rasio Efektivitas Tahun 2013-2017

Kota/ Kabupaten	Rasio Efektivitas (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Sleman	150,556	149,018	114,018	116,722	118,159
Kota Yogyakarta	125,674	116,417	113,493	107,352	128,548
Kabupaten Bantul	131,876	134,807	125,032	115,726	133,842
Kabupaten Gunung Kidul	125,058	176,352	134,447	119,685	141,063
Kabupaten Kulon Progo	148,249	170,903	90,958	104,546	112,873

Sumber data: Hasil Analisis 2019

Analisis untuk rata-rata Rasio Efektivitas Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta selama tahun 2013-2017 paling besar adalah Kabupaten Gunung Kidul sebesar 139,321%. Sedangkan rata-rata paling kecil adalah Kota Yogyakarta sebesar 118,297%. Hal ini dikarenakan anggaran dan realisasi PAD Kabupaten Gunung Kidul

sama kecilnya serta juga mendominasi perolehan nilai rasio tertinggi dari tahun 2013 sampai tahun 2017, dengan demikian tingkat efektivitas menunjukkan sangat efektif.

3.2 Rasio Keserasian

Rasio Keserasian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Operasi Tahun 2013-2017

Kota/Kabupaten	Rasio Belanja Operasi (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Sleman	87,287	84,467	80,172	84,656	82,850
Kota Yogyakarta	86,447	85,514	83,320	84,300	80,146
Kabupaten Bantul	86,448	81,167	81,196	84,353	81,804
Kabupaten Gunung Kidul	86,137	89,882	83,280	83,690	75,262
Kabupaten Kulon Progo	86,713	85,636	80,197	79,324	79,598

Sumber data: Hasil Analisis 2019

Analisis untuk rata-rata Rasio Keserasian Belanja Operasi Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta tahun 2013-2017 paling besar adalah Kota Yogyakarta sebesar 83,945%, serta rata-rata paling kecil adalah Kabupaten Kulon Progo sebesar 82,294%. Hal ini dikarenakan Kota Yogyakarta memiliki belanja operasi lebih besar daripada Kabupaten Kulon Progo terutama pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja hibah.

Tabel 3. Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Modal Tahun 2013-2017

Kota/Kabupaten	Rasio Belanja Modal (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Sleman	12,713	15,487	19,814	15,323	17,097
Kota Yogyakarta	13,552	14,445	16,679	15,615	19,837
Kabupaten Bantul	13,539	18,811	18,770	15,618	18,081
Kabupaten Gunung Kidul	13,863	10,090	16,711	16,310	24,574
Kabupaten Kulon Progo	13,237	14,356	19,785	20,498	20,325

Sumber data: Hasil Analisis 2019

Analisis untuk rata-rata Rasio Keserasian Belanja Modal Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta tahun 2013-2017 paling besar adalah Kabupaten Kulon Progo sebesar 17,640%, serta rata-rata paling kecil Kota Yogyakarta sebesar 16,026%. Hal ini dikarenakan belanja daerah Kota Yogyakarta lebih besar daripada Kabupaten Kulon Progo terutama pada belanja operasi dan belanja modal.

3.3 Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan:

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P₀ = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Tabel 4. Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD Tahun 2013-2017

Kota/Kabupaten	Rasio Pertumbuhan PAD (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Sleman	49,225	27,615	12,173	11,510	15,127
Kota Yogyakarta	13,234	22,866	8,479	5,867	21,562
Kabupaten Bantul	34,574	59,418	9,293	3,541	22,184
Kabupaten Gunung Kidul	24,424	90,950	23,097	5,191	31,555
Kabupaten Kulon Progo	29,668	65,248	7,690	5,533	38,508

Sumber data: Hasil Analisis 2019

Analisis untuk rata-rata Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta tahun 2013-2017 paling besar adalah Kabupaten Gunung Kidul sebesar 35,043%, serta rata-rata paling kecil adalah Kota Yogyakarta sebesar 14,402%. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul terbilang rendah disetiap tahunnya lebih rendah daripada Kota Yogyakarta terutama pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, tetapi dengan demikian dapat menghasilkan nilai rasio yang besar.

Tabel 5. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2013-2017

Kota/Kabupaten	Rasio Pertumbuhan Pendapatan (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Sleman	19,488	9,334	10,487	1,502	12,297
Kota Yogyakarta	13,131	11,466	-1,763	10,019	5,172
Kabupaten Bantul	13,661	19,313	7,570	2,517	4,327
Kabupaten Gunung Kidul	36,034	-6,252	16,474	3,461	11,652
Kabupaten Kulon Progo	13,664	11,687	9,554	10,639	4,936

Sumber data: Hasil Analisis 2019

Analisis untuk rata-rata Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta selama tahun 2013 sampai 2017 paling besar adalah Kabupaten Gunung Kidul sebesar 12,274%, serta rata-rata paling kecil adalah Kota Yogyakarta sebesar 7,605%. Hal ini dikarenakan perolehan pendapatan daerah Kabupaten Gunung Kidul lebih besar daripada Kota Yogyakarta terutama pada dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Tabel 6. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi Tahun 2013-2017

Kota/Kabupaten	Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Sleman	14,388	8,619	11,933	10,061	-2,952
Kota Yogyakarta	14,247	7,241	12,061	9,411	-15,147
Kabupaten Bantul	6,635	14,460	8,160	5,906	-1,911
Kabupaten Gunung Kidul	13,042	16,711	4,675	1,461	0,923
Kabupaten Kulon Progo	14,848	8,234	4,800	9,756	0,767

Sumber data: Hasil Analisis 2019

Analisis untuk rata-rata Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta tahun 2013-2017 paling besar adalah Kabupaten Sleman sebesar 8,410%, serta rata-rata paling kecil adalah Kota Yogyakarta sebesar 5,563%. Hal ini dikarenakan perolehan belanja operasi Kabupaten Sleman lebih besar daripada Kota Yogyakarta terutama pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Tabel 7. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Modal Tahun 2013-2017

Kota/Kabupaten	Rasio Pertumbuhan Belanja Modal (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Sleman	56,078	36,741	50,880	-19,396	10,647
Kota Yogyakarta	89,141	15,561	32,793	1,246	13,377
Kabupaten Bantul	30,807	69,376	7,881	-15,176	17,095
Kabupaten Gunung Kidul	-4,860	-18,599	87,113	-1,463	69,093
Kabupaten Kulon Progo	-16,585	18,865	54,223	14,962	-0,428

Sumber data: Hasil Analisis 2019

Analisis untuk rata-rata Rasio Pertumbuhan Belanja Modal Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta selama tahun 2013 sampai 2017 paling besar adalah Kota Yogyakarta sebesar 30,424%, serta rata-rata paling kecil adalah Kabupaten Kulon Progo sebesar 14,207%. Hal ini dikarenakan perolehan belanja modal Kota Yogyakarta lebih besar daripada Kabupaten Kulon Progo.

3.4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dilihat dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100 \%$$

Tabel 8. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2013-2017

Kota/Kabupaten	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Sleman	23,652	27,607	28,028	30,791	31,567
Kota Yogyakarta	29,250	32,241	35,603	34,259	39,599
Kabupaten Bantul	14,747	19,704	20,019	20,219	23,680
Kabupaten Gunung Kidul	5,697	11,604	12,264	12,469	14,692
Kabupaten Kulon Progo	9,569	14,157	13,917	13,274	17,521

Sumber data: Hasil Analisis 2019

Analisis untuk rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta tahun 2013-2017 paling besar adalah Kota Yogyakarta sebesar 34,190%, sedangkan rata-rata paling kecil adalah Kabupaten Gunung Kidul sebesar 11,345% hal ini dikarenakan perolehan PAD Kota Yogyakarta lebih besar daripada Kabupaten Gunung Kidul terutama pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Kota Yogyakarta masih menunjukkan tingkat kemandirian yang rendah karena rasio kemandirian keuangan antara 25% sampai 50% dan termasuk kategori pola hubungan bersifat konsultatif yang artinya dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah. Sedangkan Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan tingkat kemandirian yang rendah sekali karena rasio kemandirian keuangan antara 0% sampai 25% dan termasuk kategori pola hubungan bersifat instruktif yang artinya peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

3.5 Analisis Commonsized Laporan Realisasi Anggaran

Tabel 9. Perhitungan Analisis Commonsized LRA Tahun 2013-2017

URAIAN	Rata-Rata Tahun 2013-2017 (%)				
	Sleman	Yogyakarta	Bantul	Ga Kidul	K.Progo
PENDAPATAN DAERAH	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Pendapatan Asli Daerah	28.329	34.286	19.673	11.345	13.688
Pendapatan Pajak Daerah	16.825	20.572	6.377	1.963	2.092
Pendapatan Retribusi Daerah	2.052	2.944	1.446	1.831	0.781
Hasil Pengalokasian Kekayaan yg Dipisahkan	1.329	1.174	0.856	0.639	0.990
Lain-lain PAD yang sah	8.122	9.566	10.993	6.911	9.863
Dana Perimbangan	51.146	49.879	60.104	49.246	65.449
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	2.346	3.125	1.772	4.948	14.980
Dana Alokasi Umum	44.808	43.469	50.786	55.603	54.472
Dana Alokasi Khusus	4.013	2.601	7.586	5.930	8.854
Lain-lain Pendapatan yang sah	20.525	15.985	20.223	19.409	20.863
Hibah	0.241	0.196	0.644	0.237	1.546
Dana Darurat	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemda	11.018	6.954	6.176	4.473	5.126
Dana Partisipasi dan Otomatis Khusus	6.142	12.998	12.290	12.552	9.579
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda	1.118	0.383	1.374	2.242	1.690
Lain-lain	4.603	0.874	1.756	-	5.447
SELANJA	88.798	97.583	92.236	86.492	91.952
Belanja Operasi	75.287	81.856	76.236	72.354	75.674
Belanja Pegawai	51.495	51.000	53.431	54.651	56.475
Belanja Bangun dan Jasa	19.419	27.434	18.877	13.155	15.799
Belanja Bunga	0.047	0.004	0.001	0.001	0.008
Belanja Subsidi	1.028	-	-	-	-
Belanja Hibah	2.649	3.116	1.896	3.191	2.403
Belanja Bantuan Sosial	1.472	0.234	2.699	0.991	0.989
Belanja Modal	14.496	15.688	15.294	14.103	16.217
Belanja Tak Terduga	0.830	0.829	0.838	0.859	0.861
Transfer	6.716	0.173	4.645	8.792	7.252
Belanja Bagi Hasil Ipd Provinsi/Kab/Kota/Pemdes	1.791	0.075	0.627	1.102	0.234
Belanja Bantuan Kew Ipd Provinsi/Kota/Kab/Pemdes	4.926	0.158	5.336	9.612	7.028
Surplus/Defisit	3.486	2.324	3.118	4.716	0.795
Penerimaan Pembiayaan	18.524	17.828	12.306	11.822	8.389
Pengeluaran Pembiayaan	4.763	2.746	1.816	1.486	1.895
Pembiayaan Netto	16.133	15.632	10.490	10.360	7.213
SILPA	19.619	16.361	13.685	12.488	8.484

Sumber data: Hasil Analisis

Analisis untuk rata-rata commonsize Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta tahun 2013-2017 pada rasio pendapatan asli daerah terlihat nilai tertinggi berada di Kota Yogyakarta sebesar 34,206% yang artinya apabila pendapatan daerah 100% maka rata-rata PAD nya 34,206% kondisi ini dikarenakan rasio PAD jumlahnya paling besar terutama pada pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Analisis untuk rata-rata commonsize Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta tahun 2013-2017 pada rasio dana perimbangan terlihat nilai tertinggi berada di Kabupaten Gunung Kidul sebesar 69,246% yang artinya apabila pendapatan daerah 100% maka rata-rata dana perimbangannya 69,246% kondisi ini dikarenakan rasio dana perimbangan jumlahnya paling besar terutama pada dana bagi hasil pajak/ bukan pajak dan dana alokasi umum. Analisis untuk rata-rata commonsize Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta tahun 2013-2017 pada rasio lain-lain PAD yang sah terlihat nilai tertinggi berada di Kabupaten Kulon Progo sebesar 20,863% yang artinya apabila pendapatan daerah 100% maka rata-rata lain-lain PAD yang sah nya 20,863% kondisi ini dikarenakan rasio lain-lain PAD yang sah jumlahnya paling besar terutama pada hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda dan lain-lain.

Analisis untuk rata-rata commonsize Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta tahun 2013-2017 pada rasio belanja daerah terlihat nilai tertinggi berada di Kota Yogyakarta sebesar 97,503% yang artinya apabila pendapatan daerah 100% maka rata-rata belanja daerahnya 97,503% kondisi ini dikarenakan rasio belanja daerah jumlahnya paling besar terutama pada belanja operasi dan belanja modal. Analisis untuk rata-rata commonsize Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta tahun 2013-2017 pada rasio transfer terlihat nilai tertinggi berada di Kabupaten Gunung Kidul sebesar 8,792% yang artinya apabila pendapatan daerah 100% maka rata-rata transfernya 8,792% kondisi ini dikarenakan rasio transfer jumlahnya paling besar terutama pada belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kab/kota/pemdes.

Analisis untuk rata-rata commonsize Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta tahun 2013-2017 pada rasio surplus/defisit terlihat nilai tertinggi berada di Kabupaten Gunung Kidul sebesar 4,716% yang artinya apabila pendapatan daerah 100% maka rata-rata surplus/defisitnya 4,716% kondisi ini dikarenakan pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah dan transfer hasilnya paling besar.

3.6 Analisis Indeks Laporan Realisasi Anggaran

Tabel 10. Perhitungan Analisis Indeks LRA Tahun 2013-2017

URAIAN	Rata-rata Tahun 2013-2017 (%)				
	Slaman	Yogya	Bantul	G.Kidal	K.Progo
PENDAPATAN DAERAH	112,082	113,580	123,298	102,489	122,286
Pendapatan Asli Daerah	142,833	133,757	166,882	219,787	178,225
Pendapatan Pajak Daerah	139,092	135,709	145,397	256,240	308,231
Pendapatan Retribusi Daerah	94,834	107,730	98,944	116,350	61,293
Hasil Pengelolaan Kekayaan yg Dipisahkan	195,301	134,962	171,917	150,747	143,144
Lain-lain PAD yang sah	165,477	139,523	201,217	286,081	192,452
Dana Perimbangan	115,565	112,999	128,899	99,886	117,971
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	99,789	64,913	89,787	28,482	75,568
Dana Alokasi Umum	107,740	84,010	110,644	112,756	111,466
Dana Alokasi Khusus	175,852	522,309	314,769	243,721	218,064
Lain-lain Pendapatan yang sah	99,264	86,144	104,371	108,788	111,578
Hibah	553,974	-	251,414	-	85,679
Dana Darurat	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda	180,986	132,442	151,600	156,924	155,996
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	447,494	82,529	90,641	98,072	88,679
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda	86,149	-	81,619	99,817	-
Lain-lain	36,130	102,725	-	-	-
BELANJA	123,881	117,886	128,881	121,790	128,998
Belanja Operasi	118,775	114,262	123,394	117,585	114,321
Belanja Pegawai	110,876	105,810	104,572	111,024	105,016
Belanja Barang dan Jasa	146,529	132,302	187,389	223,339	190,192
Belanja Bunga	3,950,860	71,462	71,468	53,178	372,440
Belanja Subsidi	100,000	-	-	-	-
Belanja Hibah	139,880	138,398	262,949	62,484	74,148
Belanja Bantuan Sosial	151,183	54,823	345,589	62,891	86,238
Belanja Modal	158,671	148,108	157,788	147,586	164,555
Belanja Tak Terkaya	-	2,347,885	438,289	-	169,867
Transfer	236,657	106,219	261,277	279,147	284,385
Belanja Bagi Hasil Ipd Provinsi/Kab/Kota/Kab/Pemdes	120,657	-	-	32,166	248,080
Belanja Bantuan Keu Ipd Provinsi/Kota/Kab/Pemdes	353,954	95,966	298,785	-	285,696
Surplus/Defisit	34,154	45,989	38,972	23,952	15,878
Penerimaan Pembiayaan	143,183	114,133	212,345	168,229	147,465
Pengeluaran Pembiayaan	88,890	6,327,523	84,473	159,159	235,985
Pembiayaan Netto	168,989	108,853	228,908	169,573	139,482
SILPA	100,382	77,687	124,287	177,302	98,685

Sumber data: Hasil Analisis

Analisis untuk rata-rata indeks Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta tahun 2013-2017 pada rasio pendapatan daerah terlihat nilai tertinggi berada di Kabupaten Bantul sebesar 123,298% yang artinya apabila pendapatan daerah ditahun dasar 100% maka rata-rata pendapatan daerahnya 123,298% kondisi ini dikarenakan rasio pendapatan daerah jumlahnya paling besar terutama pada PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Analisis untuk rata-rata indeks Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta tahun 2013-2017 pada rasio pendapatan asli daerah terlihat nilai tertinggi berada di Kabupaten Gunung Kidul sebesar 219,707% yang artinya apabila pendapatan asli daerah ditahun dasar 100% maka rata-rata pendapatan asli daerahnya 219,707% kondisi ini dikarenakan pendapatan asli daerah jumlahnya paling besar terutama pada pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Analisis untuk rata-rata indeks Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta tahun 2013-2017 pada rasio dana perimbangan terlihat nilai tertinggi berada di Kabupaten Bantul sebesar 120,099% yang artinya apabila dana perimbangan ditahun dasar 100% maka rata-rata dana perimbangannya 120,099% kondisi ini dikarenakan rasio dana perimbangan jumlahnya paling besar terutama pada dana bagi hasil pajak/bukan pajak dan dana alokasi umum. Analisis untuk rata-rata indeks Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta tahun 2013-2017 pada rasio lain-lain pendapatan yang sah terlihat nilai tertinggi berada di Kabupaten Kulon Progo sebesar 111,570% yang artinya apabila lain-lain pendapatan yang sah ditahun dasar 100% maka rata-rata lain-lain pendapatan yang sahnya 111,570% kondisi ini dikarenakan rasio lain-lain pendapatan yang sah jumlahnya paling besar terutama pada hibah.

Analisis untuk rata-rata indeks Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta tahun 2013-2017 pada rasio belanja daerah terlihat nilai tertinggi berada di Kabupaten Bantul sebesar 128,081% yang artinya apabila belanja daerah ditahun dasar 100% maka rata-rata belanja daerahnya 128,081% kondisi ini dikarenakan rasio belanja daerah jumlahnya paling besar terutama pada belanja operasi dan belanja modal. Analisis untuk rata-rata indeks Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta Tahun 2013-2017 pada rasio transfer terlihat nilai tertinggi berada di Kabupaten Kulon Progo sebesar 284,395% yang artinya apabila transfer ditahun dasar 100% maka rata-rata transfernya 284,395% kondisi ini dikarenakan rasio transfer jumlahnya paling besar terutama pada belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kab/kota/pemdes.

Analisis untuk rata-rata indeks Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta tahun 2013-2017 pada rasio surplus/defisit terlihat nilai tertinggi berada di Kota Yogyakarta sebesar 45,989% yang artinya apabila surplus/defisit ditahun dasar 100% maka rata-rata surplus/defisitnya 45,989% kondisi ini dikarenakan pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah dan transfer hasilnya paling besar.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Rasio Efektivitas rata-rata menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat efektif, kecuali Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016 memiliki tingkat efektivitas yang cukup efektif saja.
- b. Rasio Keserasian menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dana belanja daerah yang dimiliki lebih besar digunakan untuk belanja operasi daripada untuk belanja modal.
- c. Rasio Pertumbuhan menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta tahun 2013 sampai 2017 mengalami pertumbuhan yang naik turun. Rata-rata pertumbuhannya cukup baik karena mengalami rata-rata pertumbuhan yang positif.
- d. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemandirian yang masih rendah dan termasuk dalam kategori pola hubungan instruktif dan konsultatif karena rasio kemandiriannya antara 0%-25% dan 25%-50%.
- e. Berdasarkan perhitungan pada 4 rasio keuangan daerah tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah yang paling baik adalah Kabupaten Sleman karena konsisten dalam menunjukkan nilai rata-rata yang tinggi.
- f. Analisis Commonsize Laporan Realisasi Anggaran pada rasio pendapatan daerah penghasilan terbesar berada pada komponen dana perimbangan yang memiliki nilai rata-rata diatas 50%. Pada rasio belanja daerah alokasi dana lebih banyak digunakan untuk belanja operasi daripada untuk belanja modal. Sedangkan untuk surplus/defisit rata-ratanya cukup baik, walaupun fluktuatif tetapi tidak menunjukkan nilai defisit/negatif.
- g. Analisis Indeks Laporan Realisasi Anggaran pada rasio pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah cukup baik karena rata-ratanya diatas tahun dasar 100%, hanya di Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang rata-ratanya dibawah tahun dasar. Pada rasio belanja daerah, belanja operasi, belanja modal, belanja tak

terduga dan transfer rata-ratanya juga diatas tahun dasar 100%. Sedangkan pada surplus/defisit rata-ratanya dibawah tahun dasar 100% tetapi cukup baik karena tidak menunjukkan nilai negatif/defisit.

4.2 Keterbatasan Penelitian

Beberapa hal yang menjadikan adanya keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya menggunakan empat rasio keuangan yaitu rasio efektivitas, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio kemandirian.
- b. Penelitian ini hanya menggunakan populasi Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta.
- c. Penelitian ini hanya meneliti lima tahun yaitu tahun 2013 sampai 2017.
- d. Data dari DJPK kemungkinan datanya kurang valid karena masih banyak kekeliruan.
- e. Dalam penentuan target pendapatan daerah tidak melihat potensi riil daerahnya.

4.3 Saran

Adanya keterbatasan dari hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut:

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah rasio keuangan yang digunakan, tidak hanya menggunakan empat rasio keuangan saja.
- b. Peneliti selanjutnya juga dapat menambah populasi penelitian, tidak hanya mengambil 1 Karesidenan.
- c. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah lagi jangka waktu penelitian, tidak hanya lima tahun saja.
- d. Data yang akan digunakan lebih baik menggunakan data dari LHP LKPD (Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah).
- e. Penelitian selanjutnya diharapkan melihat potensi riil daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Engka, Daisy M, Sri Murni dan Vera Sri Endah Cicilia.
- Fathah, Rigel Nurul. 2017. Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK Vol 8 No 1*.

- Faud, Ramli Muhammad. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Halim, Abdul. 2002. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2010. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Hanafi dan Halim. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Hanik, Fitri Umi dan Tutik Dwi Karyanti. 2014. Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja. *JABPI Vol 22 No 2. ISSN: 1411-6871*.
- Kusumawati, Eny., Rina Trisnawati., dan Fatchan Achyani. 2018. *Analisis Laporan Keuangan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Ks, Lazyra. 2016. *Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* Edisi Dua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mariani, Lidia. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sesudah Pemekaran Daerah. *Artikel Ilmiah* Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Sumatra Barat.
- Mohammad, Mahsun. 2011. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mohammad, Mahsun. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Pramita, Puput Risky. 2015. *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Prastowo dan Juliaty. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Rahardjo, Adisasmita. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramadhani, Febby Randria. 2016. Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Di Kota Tarakan Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 14 No 01*.

- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 *Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Republik Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 12 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
-
- Rondonuwu, Ritno. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA Vol 3 No 4. ISSN: 2303-1174*.
- Ropa, Mega Oktavia. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA Vol 4 No 2. ISSN: 2303-1174*.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno. 2001. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Teori, Konsep, dan Aplikasi Ekonomi Kampus Fakultas Ekonomi UIL.